

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS

Nomor : 17443/D.2.2/07/2024

DIREKTUR SISTEM PENGADAAN DIGITAL

Menimbang : 1. Untuk mendukung arah kebijakan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perlu dilakukan pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terpusat;

2. SPSE adalah salah satu aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, sehingga dalam implementasinya perlu memperhitungkan aspek-aspek teknis SPBE yang salah satunya adalah Manajemen Keamanan Informasi; dan

3. Dalam rangka melaksanakan pengembangan SPSE dan sistem pendukung, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemusatan basis data SPSE melalui proses migrasi basis data dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31); dan

5. Keputusan Kepala LKPP Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pemusatan dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik

MEMBERI TUGAS

Kepada : Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat tugas ini.

Untuk : 1. Mempersiapkan kebijakan Pengelolaan dan pemusatan basis data SPSE melalui proses migrasi basis data dari UKPBJ ke LKPP;

2. Melakukan koordinasi teknis dengan pihak terkait;

3. Mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan monitoring proses migrasi basis data dari UKPBJ ke LKPP;

4. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi kepada UKPBJ;

5. Melakukan pendampingan kepada UKPBJ selama proses migrasi basis data;

6. Melakukan monitoring dan evaluasi pasca proses migrasi basis data.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada anggaran DIPA LKPP dan/atau PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Tahun Anggaran 2024. Adapun penugasan yang dimaksud berlaku sejak Surat Tugas ini ditandatangani sampai 31 Desember 2024.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Juli 2024
Direktur Sistem Pengadaan Digital,





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Patria Susantosa

19731201 200312 1 004



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara digital melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 17443/D.2.2/07/2024

Tanggal : 03 Juli 2024

No.	Nama	NIP	Gol	Jabatan	Keterangan
1	Januar Indra	19770103 200502 1 003	IV/b	Analisis Kebijakan Madya Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
2	Linda Mikowati	19870726 201211 2 001	III/d	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
3	Sugianto	19820408 201012 1 001	IV/a	Analisis Kebijakan Madya Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
4	Audita Octaviani	19921020 201902 2 001	III/b	Analisis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
5	Niken Mustikarini	19900814 202203 2 002	III/a	Analisis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
6	Eko Nirwanto Putro Hanardi	19870801 202203 1 001	III/a	Analisis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
7	Astri Erviana	19920408 201801 2 001	III/b	Analisis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
8	Yudhianto Dwi Andika Putra	19881016 201502 1 002	III/c	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
9	Dissa Patricia	19850316 201902 2 001	III/b	Analisis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
10	Alina Mahardhika Puspa	19950810 201801 2 001	III/b	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
11	Abraham Dhius Malau			Penyedia Jasa Lainnya	
12	Syahrudin			Penyedia Jasa Lainnya	



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara digital melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

13	Linda Azmi Mustikasari	19940808 202421 2 029	VII	Arsiparis Terampil Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
14	Benedita Dea Puspita			Penyedia Jasa Lainnya	
15	Dhanu Trinandha			Penyedia Jasa Lainnya	
16	Tri Yani Elisabeth Nababan			Penyedia Jasa Lainnya	
17	Gama Maulana Putra			Penyedia Jasa Lainnya	
18	Muhammad Syaindy			Penyedia Jasa Lainnya	
19	Rangga Fitri Mardiansyah			Penyedia Jasa Lainnya	
20	Galih Pratama Sadewo			Penyedia Jasa Lainnya	
21	Mutiah Risky	19981027 202421 2 016	IX	Pranata Komputer Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
22	Ryva Alviyani			Penyedia Jasa Lainnya	
23	Mirayanti	19920622 202203 2 001	III/a	Perencana Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
24	Nofita Yuli Saputri	19980628 202421 2 005	VII	Pranata Komputer Terampil Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
25	Selamat Riady	19950101 202421 1 008	VII	Pranata Komputer Terampil Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
26	Muhammad Ihsan	20000705 202421 1 001	IX	Pranata Komputer Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital	
27	Ibnu Kusumo Baskara			Penyedia Jasa Lainnya	
28	Arif Hermawan			Penyedia Jasa Lainnya	
29	Aris Hidayat			Penyedia Jasa Lainnya	
30	Ahmad Arifin			Penyedia Jasa Lainnya	
31	Andhika Dermawan			Penyedia Jasa Lainnya	

